

KITA TANGGUH

Media Informasi & Aksi Kebencanaan Indonesia

November Siaga: Menguatkan Kesiapsiagaan, Mengokohkan Kolaborasi

Dari Komunitas untuk
Negeri
Gerakan Komunitas
dan Relawan Tangguh

Kolaborasi Tanpa
Batas
Sinergi Pemerintah,
Sektor Swasta,
Relawan, dan
Masyarakat

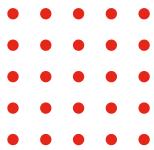
Budaya Tangguh
Bencana
Kesiapan
menghadapi bencana





Table of contents

1	Pengantar	01
2	Visi dan Misi	02
3	Rencana Startegis Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029	03
4	Langkah Kita	04
5	Dari Sungai untuk Negeri: KP2C dan Kemenko PMK Bersinergi Wujudkan Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas	06
6	Mengapa Ketangguhan Harus Dimulai dari Komunitas?	07
7	Kita TANGGUH - Kolaborasi Tanpa Batas	08
8	Dari Data ke Dampak Nyata	09
9	Wawasan Tangguh Bencana	10
10	Bersinergi dalam Krisis	11
11	Budaya Tangguh Bencana	12
12	Testimonial, Kolaborasi Tangguh	13
13	Menko PMK Kenalkan Gerakan Kita Tangguh	14
14	Menyatukan Hati untuk Kemanusiaan	15
15	Dengar, Lihat, Selamat: Mewujudkan Early Warning yang Inklusif	16
16	Kolaborasi yang Tangguh Saat Dunia Usaha Turun Tangan Hadapi Bencana	17



DR. LILIK KURNIAWAN

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Majalah "KITA TANGGUH" edisi bulan November hadir mengusung tema "November Siaga: Menguatkan Kesiapsiagaan, Mengokohkan Kolaborasi."

Edisi ini menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan nasional melalui langkah koordinatif yang terarah dan dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Sebelum memasuki ulasan utama, izinkan kami membuka edisi ini dengan sebuah pantun:

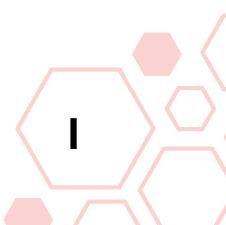
Air bah datang tak pernah memberi tanda,
Angin kencang pun kerap tiba-tiba menerjang.
Mari siaga dari sekarang untuk hadapi bencana,
Agar bangsa kuat, tumbuh tangguh, dan selalu menang.

Penanggulangan bencana dan pencegahan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama, yang hanya dapat mencapai hasil optimal apabila dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan relawan.

Majalah ini kami hadirkan sebagai media informasi, edukasi, dan apresiasi terhadap praktik baik yang telah dilakukan di berbagai wilayah. Melalui dokumentasi capaian, narasi lapangan, serta refleksi pengalaman kolektif, kami berharap publik semakin memahami bahwa kesiapsiagaan adalah elemen penting dalam membangun ketangguhan bangsa. Ketangguhan tidak lahir dari kesiapan individu semata, melainkan dari kemampuan untuk bergerak bersama, cepat, dan tepat dalam menghadapi setiap potensi ancaman. Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan penerbitan majalah ini. Semoga upaya bersama ini memberikan manfaat dan memperkokoh semangat kebersamaan dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan siap siaga.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



NEXT

NOW



Visi & Misi

► Visi

Terwujudnya koordinasi nasional yang efektif dan terpadu dalam penanggulangan bencana dan konflik sosial sebagai fondasi ketangguhan bangsa.

► Misi

1. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga dalam penanggulangan bencana dan konflik sosial sesuai agenda pembangunan nasional.
2. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah agar respons kebencanaan dan konflik lebih tepat sasaran.
3. Meningkatkan kapasitas analisis data, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat pengambilan keputusan.
4. Membangun jejaring kemitraan lintas sektor (pemerintah, swasta, organisasi masyarakat) untuk menguatkan kolaborasi dalam setiap fase penanggulangan.
5. Menyebarluaskan informasi edukatif dan praktik baik agar masyarakat turut aktif dalam budaya kesiapsiagaan dan mitigasi konflik.

Strategic Plan

Rencana Startegis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025–2029

► Membangun Manusia, Memperkuat Ketangguhan Bangsa

Kemenko PMK berperan mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan lintas sektor di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Renstra 2025–2029 menjadi arah strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada empat transformasi utama: Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, dan Ketahanan Sosial-Budaya.

Tujuannya: mewujudkan SDM unggul, berkarakter, inklusif, dan berdaya saing serta memperkuat kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

► Dalam bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial, fokus diarahkan pada:

1. Penguatan sistem dan koordinasi penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis masyarakat.
3. Pemulihan pascabencana yang cepat dan berkelanjutan.
4. Penguatan rekonsiliasi dan harmoni sosial pascakonflik.

► Pelaksanaannya didorong melalui tiga nilai utama:



Inovasi



Kolaborasi



Akuntabilitas

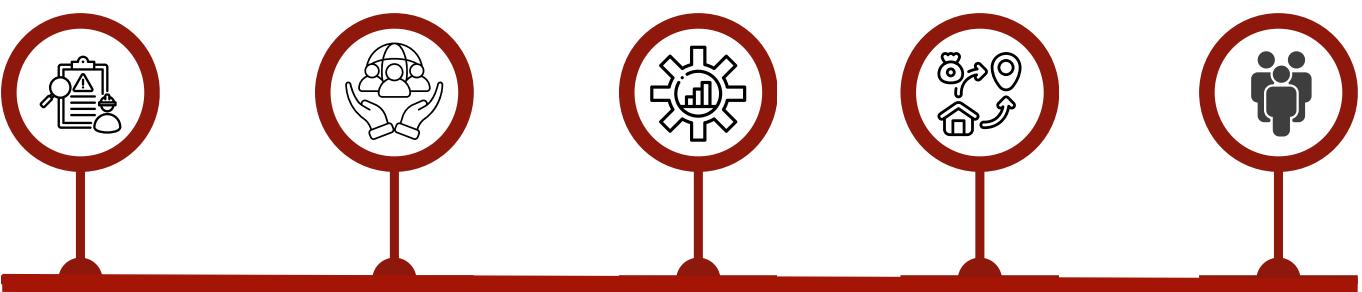
“

“Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, Kemenko PMK berkomitmen membangun masyarakat tangguh, inklusif, dan berdaya menuju Indonesia Emas 2045.”

Langkah Kita

Tahun 2025 menjadi tahun penuh gerak dan kolaborasi. Melalui semangat “Kita Tangguh”, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK terus menguatkan langkah menuju bangsa yang lebih siap, berdaya, dan berketeraan terhadap bencana.

Edisi KITA TANGGUH kali ini menyoroti berbagai kegiatan dan inovasi dalam membangun ketangguhan bangsa. Sebagai majalah internal Kemenko PMK, KITA TANGGUH menjadi media informasi dan publikasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial yang menampilkan program, kebijakan, dan capaian menuju masyarakat tangguh dan harmonis.



Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Kita Tangguh tidak hanya menjadi media dokumentasi kegiatan, tetapi juga ruang refleksi dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi tantangan bencana dan konflik sosial.



DARI SUNGAI UNTUK NEGERI: KP2C DAN KEMENKO PMK BERSINERGI WUJUDKAN SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS KOMUNITAS

Dari tepian Sungai Ciliwung dan Cikeas, tumbuh semangat warga yang menjelma menjadi gerakan nyata. Komunitas Peduli Ciliwung-Cikeas (KP2C) hadir membawa harapan baru bagi ribuan masyarakat di Bogor dan Bekasi yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman banjir. Dalam audiensi bersama Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, KP2C memaparkan inisiatif mereka membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas yang efektif dan partisipatif.

Sejak 2016, KP2C secara swadaya mengembangkan teknologi sederhana namun berdampak besar—mulai dari pemasangan CCTV pemantau debit air hingga sistem peringatan otomatis melalui WhatsApp, Telegram, dan SMS. Kini, lebih dari 32 ribu warga dapat memantau kondisi sungai secara real-time. “Kami ingin masyarakat tenang saat hujan deras turun, karena mereka sudah tahu kondisi sungai dan langkah yang harus diambil,” ujar Puarman, Ketua KP2C, menggambarkan semangat warga yang tak kenal lelah menjaga lingkungannya.

Deputi Lilik Kurniawan dari Kemenko PMK menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif tersebut. Ia menilai sistem KP2C sebagai wujud nyata kekuatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan layak menjadi role model nasional. “Kolaborasi seperti ini harus diperluas. Pemerintah akan mendorong daerah-daerah lain untuk mereplikasi sistem ini,” tegasnya. Pemerintah pusat juga telah mengakomodasi upaya normalisasi tiga sungai utama Ciliwung, Cikeas, dan Cilengsi sebagai bagian dari kebijakan mitigasi banjir nasional.

Pertemuan ini menjadi lebih dari sekadar audiensi; ia adalah pengingat bahwa ketangguhan bangsa lahir dari komunitas yang peduli. Dari tangan-tangan warga di tepian sungai, tumbuh kekuatan baru yang mengalir membawa perubahan. Melalui sinergi KP2C dan Kemenko PMK, semangat Dari Sungai untuk Negeri kini menjadi inspirasi bagi lahirnya sistem peringatan dini berbasis komunitas di seluruh Indonesia karena ketangguhan sejati dimulai dari bawah, dari masyarakat yang saling menjaga.



Dok Ciliwing
Komunitas

Mengapa Ketangguhan Harus Dimulai dari Komunitas?

- **Garda Terdepan Saat Bencana**
Komunitas adalah pihak pertama yang bergerak sebelum bantuan datang, menyelamatkan nyawa dan memulihkan keadaan dengan cepat.
- **Sinergi yang Menguatkan**
Ketangguhan lahir dari kolaborasi antara warga, pemerintah, dan lembaga yang saling melengkapi dalam kesiapsiagaan.
- **Berawal dari Kepedulian** Lebih dari sekadar kesiapan fisik, ketangguhan sejati tumbuh dari kesadaran untuk saling melindungi dan membangun harapan bersama.

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 menegaskan masyarakat sebagai subjek utama dalam penanggulangan bencana dari kesiapsiagaan hingga tanggap darurat. Ketentuan ini diperkuat oleh Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 yang menempatkan komunitas sebagai penggerak utama ketangguhan di tingkat lokal.

“Komunitas tangguh adalah benteng pertama bangsa dalam menghadapi bencana”

Sinergi Pemerintah, Sektor Swasta, Relawan, dan Masyarakat



Kemenko PMK dan Astra Gelar Private Sector Resilience Movement 2025: Perkuat Kolaborasi Dunia Usaha dalam Ketangguhan Bencana

Dalam semangat gotong royong menghadapi bencana, Kemenko PMK bersama PT Astra International meluncurkan Private Sector Resilience Movement (PSRM) 2025 di Cibubur. Inisiatif ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun ketangguhan bangsa. Melalui semangat KITA TANGGUH, gerakan ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama demi melindungi kehidupan, usaha, dan masa depan Indonesia.

Sinergi Lintas Sektor Diperkuat Kemenko PMK untuk Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Erupsi Gunung Ruang

Kemenko PMK mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Gunung Ruang. Dengan progres pembangunan hunian tetap yang telah mencapai 97 persen, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan pemulihian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat terdampak.



Gotong Royong Hadapi Bencana: Kemenko PMK & Rumah Zakat Satukan Langkah

Melalui sinergi program “Kita Tangguh” dan “Rumah Ibadah Tangguh Bencana,” Rumah Zakat bersama Kemenko PMK dan HFI berupaya memperkuat budaya siaga bencana di tingkat komunitas. Program ini menargetkan 100 ribu penerima manfaat langsung dan 4 juta masyarakat tereduksi, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Rumah Zakat berperan membina rumah ibadah lintas agama agar menjadi pusat edukasi dan aksi kemanusiaan dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

DARI DATA KE DAMPAK NYATA: KEMENKO PMK DAN JICA DORONG TRANSFORMASI KITA TANGGUH



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat langkah startegis dalam membangun masyarakat tangguh bencana. Melalui kolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kemenko PMK berkomitmen mewujudkan kebijakan pengurangan risiko bencana yang lebih berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Pertemuan antara Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Andre Notohamijoyo, dan tim JICA yang dipimpin oleh Ryoji Takahashi, pada Rabu (15/10/2025) di Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Jakarta, menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini difokuskan pada penerapan evidence-based policy untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta mempercepat integrasi kebijakan PRB di berbagai level pemerintahan.

“Kolaborasi dengan JICA ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana,” ujar Andre.

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah penguatan Flagship Kita Tangguh program unggulan Kemenko PMK yang menitikberatkan pada sinkronisasi data, monitoring, dan edukasi publik tentang kesiapsiagaan bencana. Dukungan JICA juga diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah melalui pengembangan modul pelatihan serta panduan teknis berbasis Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.

Ke depan, Kemenko PMK dan JICA akan mengembangkan Dashboard Kita Tangguh sebagai alat pemantauan nasional lintas sektor untuk menampilkan data aksi nyata, indikator capaian, dan efektivitas kebijakan PRB. Melalui Joint Workplan 2025–2026, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi program bersama. Dari kolaborasi ini, diharapkan lahir kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat Indonesia.

Wawasan Tangguh Bencana



“Wawasan tangguh bencana tumbuh dari pengetahuan yang benar, kesiapsiagaan yang berkelanjutan, dan kebersamaan dalam menghadapi risiko. Dengan memahami ancaman sejak dini, kita dapat membangun langkah yang lebih kuat dan melindungi masyarakat secara lebih menyeluruh.”

Andre Notohamijoyo - Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Ketangguhan menghadapi bencana tidak hanya dibangun dari kemampuan merespons, tetapi juga dari pemahaman yang kuat mengenai risiko. Wawasan tangguh bencana menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang mampu mengenali ancaman di sekitarnya dan mengambil langkah preventif sejak dini. Pemahaman ini menjadi fondasi pertama untuk mengurangi korban dan kerugian saat ancaman datang

Menurut Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, pengetahuan yang benar dan mudah dipahami masyarakat merupakan pintu masuk menuju ketangguhan. Edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, potensi ancaman, hingga rute evakuasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan komunitas. Dengan informasi yang tepat, kesadaran dan kewaspadaan dapat tumbuh secara alami dalam kehidupan sehari-hari.

Namun pengetahuan saja tidak cukup; praktik kesiapsiagaan harus terus dilatih. Simulasi, pelatihan, dan kegiatan masyarakat tangguh menjadi sarana efektif untuk membiasakan warga merespons situasi darurat dengan cepat dan terstruktur. Kesiapsiagaan yang berkelanjutan inilah yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi bencana, baik dalam skala kecil maupun besar.

Kolaborasi antar-pihak juga menjadi unsur penting dalam membangun ketangguhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, hingga kelompok relawan perlu bergerak dalam ritme yang sama. Sinergi tersebut memastikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan. Seperti disampaikan Asisten Deputi, kebersamaan adalah energi yang mempercepat perlindungan masyarakat.

Pada akhirnya, wawasan tangguh bencana bukan hanya konsep teknis, tetapi budaya yang perlu ditanamkan secara konsisten. Ketika pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kebersamaan berjalan seiring, masyarakat dapat menghadapi risiko dengan lebih percaya diri dan lebih aman. Dengan fondasi ini, ketangguhan bangsa dapat terus tumbuh, bahkan di tengah ancaman bencana yang semakin kompleks. Semakin kuat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat, semakin kecil pula dampak yang ditimbulkan oleh setiap potensi bahaya.

BERSINERGI DALAM KRISIS: KEMENKO PMK DORONG KLASTER BENCANA BERGERAK SATU IRAMA

“

Standar minimum layanan seperti kesehatan, logistik, pendidikan, perlindungan, hingga pemulihan harus terpenuhi dengan cepat, tepat, dan terintegrasi. Kita tidak bisa lagi bekerja secara sektoral.

Semua harus bergerak dalam satu orkestrasi yang jelas

Dalam setiap bencana, kecepatan memang dibutuhkan. Namun, tanpa langkah yang selaras dan terkoordinasi, upaya penanganan bisa kehilangan arah. Pesan inilah yang kembali ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Klaster Penanggulangan Bencana, Selasa (30/9) di Jakarta.

“Standar minimum layanan seperti kesehatan, logistik, pendidikan, perlindungan, hingga pemulihan harus terpenuhi dengan cepat, tepat, dan terintegrasi. Kita tidak bisa lagi bekerja secara sektoral. Semua harus bergerak dalam satu orkestrasi yang jelas” tegas Lilik membuka arah diskusi.

Rapat tersebut menyoroti pentingnya sinergi antar klaster agar layanan dasar bagi korban bencana dapat terpenuhi secara menyeluruh. Lilik menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penanganan darurat, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat.

Selain itu, Kemenko PMK juga menilai perlunya penataan ulang tata kelola klaster agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih efektif. Regulasi yang ada, seperti SK Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024, dinilai perlu diperkuat dengan payung hukum yang lebih komprehensif, bahkan berpotensi diangkat menjadi Peraturan Menteri Koordinator (Permenko).

Langkah konkret pun disepakati. Kemenko PMK bersama para pihak akan menyelenggarakan pertemuan berkala antar-klaster untuk memperkuat komunikasi, evaluasi, dan berbagi sumber daya. Optimalisasi Dana Siap Pakai (DSP) dan pembangunan Dashboard Klaster Penanggulangan Bencana juga menjadi fokus agar pemantauan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Menutup rapat, Lilik menegaskan bahwa kolaborasi multipihak bukan sekadar jargon, tetapi wujud nyata dari semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis. “Gotong royong adalah DNA bangsa kita,” ujarnya. “Dari sinergi inilah ketangguhan nasional akan tumbuh dan memberi perlindungan nyata bagi masyarakat di saat bencana melanda.”





Budaya Tangguh Bencana

Kesiapan

Edukasi dan Kesadaran

Pahami jenis bencana di wilayah Anda, ikuti pelatihan, dan sebarkan informasi kesiapsiagaan di komunitas.

Perencanaan dan Persiapan

Buat rencana darurat, siapkan jalur evakuasi, dan sediakan perlengkapan darurat (air, makanan, obat, dokumen penting).

Tanggap Saat Bencana

Evakuasi sesuai jalur aman, ikuti arahan petugas, gunakan perlengkapan darurat, dan bantu sesama.

Pemulihan dan Evaluasi

Bantu rehabilitasi lingkungan, catat dampak bencana, dan bagikan pengalaman untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas.



Kolaborasi Tangguh Bencana

Testimonial



Kolaborasi merupakan fondasi penting dalam setiap upaya penanggulangan bencana. Di Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, semangat bekerja bersama tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui koordinasi yang intensif dan sinergi lintas sektor. Setiap pihak membawa peran, pengalaman, dan kapasitasnya masing-masing, sehingga tantangan yang dihadapi dapat diurai dan diselesaikan secara lebih efektif.

Menurut Merry Efriana, Asisten Deputi Penanganan Bencana, kolaborasi inilah yang menjadikan berbagai proses penanganan bencana terasa lebih ringan. Dengan saling menguatkan, setiap pegawai dapat berkontribusi sesuai kompetensinya, mulai dari perencanaan, mitigasi, hingga respons cepat ketika bencana terjadi.

“Kolaborasi di Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial membuat setiap tantangan terasa lebih ringan. Dengan saling menguatkan, kami bisa menghadirkan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Sinergi tersebut tidak hanya terjadi di internal pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Merry Efriana
Asisten Deputi Penanganan Bencana,

Kerja bersama dengan berbagai pemangku kepentingan menciptakan alur koordinasi yang lebih terstruktur, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan langkah-langkah penanganan dapat dilakukan secara serempak. Hal ini menjadi kunci dalam menekan dampak bencana serta mempercepat pemulihan.

Lebih jauh, kolaborasi memberikan ruang bagi inovasi. Setiap pihak dapat berbagi sudut pandang, pengalaman, dan pembelajaran, sehingga menghasilkan solusi yang lebih adaptif terhadap tantangan lapangan. Pendekatan ini memperkuat kesiapsiagaan nasional, karena setiap unsur mampu saling melengkapi dalam menghadapi dinamika risiko yang terus berkembang.

Pada akhirnya, kolaborasi bukan hanya metode kerja, tetapi budaya yang mengakar dalam penanggulangan bencana. Semangat kebersamaan ini menjadi penggerak utama dalam mewujudkan perlindungan masyarakat yang lebih baik. Dengan kolaborasi yang konsisten, ketangguhan bangsa dapat terus diperkuat dari waktu ke waktu, memastikan Indonesia semakin siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.



Gerakan KITATANGGUH merupakan salah satu flagship Kemenko PMK dengan tiga pilar utama: Budaya Tangguh, Kolaborasi Tangguh, dan Dasbor Tangguh. Ketiganya menjadi penggerak sinergi multipihak dari pusat hingga daerah rawan bencana.

MENKO PMK KENALKAN GERAKAN KITATANGGUH: MEMBANGUN BUDAYA TANGGUH UNTUK INDONESIA KUAT HADAPI BENCANA

Membangun ketangguhan bangsa bukan hanya soal infrastruktur atau teknologi, tapi juga kesadaran kolektif untuk saling menjaga. Semangat itulah yang digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memperkenalkan Gerakan KITATANGGUH, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Gerakan ini menjadi wadah kolaboratif untuk memperkuat ketangguhan nasional dalam mengurangi risiko, menghadapi, dan memulihkan diri pasca bencana.

“Kita semua tahu betapa besar kerugian akibat bencana. Ini harus kita selesaikan bersama, dan kita semua harus benar-benar tangguh,” ujar Menko PMK dalam sambutannya di hadapan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Melalui Gerakan KITATANGGUH, pemerintah ingin menumbuhkan budaya tangguh di tingkat masyarakat. Pratikno menekankan bahwa langkah pencegahan harus dimulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pepohonan, hingga menjaga lingkungan agar tidak rawan bencana. Kesadaran ini, menurutnya, adalah fondasi penting untuk mengurangi risiko dan memperkuat kesiapsiagaan.

Selain masyarakat, peran pemerintah juga menjadi kunci. Pratikno menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan serta inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita harus memastikan infrastruktur, teknologi, dan manajemen kita tangguh,” ujarnya. Dengan begitu, sistem penanggulangan bencana nasional dapat merespons lebih cepat dan efektif di setiap situasi darurat.

Menko PMK juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam gerakan ini. Menurutnya, tangguh tidak bisa hanya dimiliki oleh satu pihak. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus berjalan beriringan untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha juga harus tangguh,” tambahnya.

Gerakan KITATANGGUH merupakan salah satu flagship Kemenko PMK dengan tiga pilar utama: Budaya Tangguh, Kolaborasi Tangguh, dan Dasbor Tangguh. Ketiganya menjadi penggerak sinergi multipihak dari pusat hingga daerah rawan bencana. Peluncuran gerakan ini turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian, lembaga, akademisi, mitra pembangunan, dan perwakilan dunia usaha yang menunjukkan komitmen bersama membangun Indonesia yang lebih siap dan kuat menghadapi bencana.



WORLD TSUNAMI
AWARENESS DAY
5 NOVEMBER

LANGKAH KUNCI KÉSIAPSIAGAAN HADAPI TSUNAMI



PERINGATAN DINI
Pantau informasi apakah gempa akan menyulut tsunami



Waspada jika air pantai mendadak surut Jauhi Pinggir Pantai



Jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat tsunami



Cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi di atas 30 meter

“ TSUNAMI TIDAK DAPAT DIHENTIKAN, TAPI
KÉSIAPSIAGAAN DAPAT MENYELAMATKAN
KEHIDUPAN”

#TsunamiDay | #GetToHighGround

MENYATUKAN HATI UNTUK KEMANUSIAAN: DARI EMPATI MENUJU BUDAYA TANGGUH BENCANA



Dalam momentum Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day) 2025, semangat kemanusiaan berpadu dengan tekad membangun ketangguhan bangsa. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyerukan pentingnya membangun budaya tangguh bencana yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Tahun 2024 saja terjadi lebih dari 3.700 kejadian yang berdampak luas, terutama pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan," ungkap Lilik dalam kegiatan yang digelar di Jakarta, Jumat (22/8). Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa kemanusiaan dan ketangguhan harus berjalan seiring.

Melalui program unggulan #KITATANGGUH, Kemenko PMK menggerakkan kolaborasi nasional untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Program ini berdiri di atas tiga pilar utama: Budaya Tangguh yang menumbuhkan kesadaran dan aksi masyarakat terhadap risiko bencana; Kolaborasi Tangguh yang menghubungkan berbagai pihak termasuk perempuan dan kelompok rentan; serta Dashboard Tangguh platform digital untuk memantau dan memperluas jangkauan edukasi ketangguhan di seluruh Indonesia.

"Target kita hingga 2029 adalah 100 ribu penerima manfaat langsung dan empat juta masyarakat yang teredukasi melalui Dashboard Tangguh. Inilah cara kita membangun budaya ketangguhan yang berkelanjutan," jelas Lilik. Ia menekankan bahwa gerakan ini bukan hanya proyek, tetapi komitmen bersama untuk menjadikan ketangguhan sebagai bagian dari identitas bangsa.

Di tengah apresiasi terhadap para pekerja kemanusiaan, Lilik juga mengingatkan pentingnya melindungi mereka sebagai garda terdepan. "Jika kita tidak mampu menjaga keselamatan mereka, maka kita telah kehilangan sisi kemanusiaan kita," ujarnya dengan tegas. Seruan ini menggugah kesadaran akan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam setiap langkah kemanusiaan.

Dengan tema "Melindungi yang Rentan, Membangun yang Tangguh", peringatan WHD 2025 menjadi refleksi bahwa kekuatan sejati bangsa terletak pada kemampuannya saling menjaga. "Mari terus #BeraksiUntukKemanusiaan. Dengan semangat KITATANGGUH, kita bangun bangsa yang peduli, siap, dan tangguh menghadapi segala tantangan," tutup Lilik.



MITIGASI BENCANA

Mitigasi bencana adalah rangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

LANGKAH-LANGKAH MITIGASI BENCANA

1. Identifikasi Risiko Bencana

Mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang berpotensi terjadi dan melakukan pemetaan wilayah rawan.

2. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Mengedukasi masyarakat tentang potensi bencana dan melakukan simulasi evakuasi di wilayah bencana.

3. Sistem Peringatan Dini

Memasang sistem peringatan dini dan memastikan informasi peringatan dapat disebarluaskan dengan cepat.

4. Memperkuat Infrastruktur

Merancang dan membangun infrastruktur yang tahan bencana serta diperkuat dengan upaya pengelolaan lingkungan.

JENIS MITIGASI BENCANA

Mitigasi Struktural

- Membangun rumah tahan gempa dengan struktur fleksibel.
- Pembangunan drainase kota yang memadai.
- Sistem jaringan pipa air di area rawan kebakaran.

Mitigasi Non-Struktural

- Mendidik masyarakat agar siap menghadapi bencana.
- Mengatur tata ruang agar aman dari potensi bahaya.
- Menyiapkan rencana evakuasi dan prosedur darurat.



DENGAR, LIHAT, SELAMAT: MEWUJUDKAN EARLY WARNING YANG INKLUSIF

Sirene bencana seharusnya tak hanya terdengar bagi sebagian orang. Pesan itu ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, saat berbicara dalam Lokakarya Early Warning for All di ajang EDR Expo 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Menurut Lilik, peringatan dini di Indonesia belum benar-benar menjangkau semua kalangan. "Ketercukupan early warning yang sampai ke masyarakat hanya sekitar enam persen. Ini masalah besar, karena informasi harus diterima semua orang termasuk penyandang tunarungu dan tunanetra agar mereka juga bisa selamat," ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem peringatan dini sejatinya berdiri di atas empat pilar utama: pengetahuan risiko, deteksi dan analisis, diseminasi informasi, serta kesiapsiagaan masyarakat. Namun, pilar terakhir masih menjadi tantangan terbesar memastikan masyarakat benar-benar menindaklanjuti peringatan dengan evakuasi yang cepat dan tepat.

Dalam kesempatan itu, Kemenko PMK memberikan apresiasi kepada Puarman, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), atas kiprahnya membangun sistem peringatan banjir berbasis masyarakat selama lebih dari dua dekade. Langkah kecil dari komunitas, kata Lilik, bisa memberi dampak besar bagi keselamatan banyak orang.

Peringatan dini bukan sekadar alat, melainkan wujud kemanusiaan. Karena menyelamatkan nyawa berarti memastikan tak satu pun tertinggal dari sistem peringatan dari Sabang sampai Merauke, dari yang mampu mendengar hingga yang tak bisa mendengar.

Lilik juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem peringatan dini. Pemerintah, lembaga riset, media, dan komunitas lokal harus bersinergi agar pesan peringatan dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat sasaran. "Early warning bukan hanya urusan teknologi, tapi komunikasi publik dan empati sosial," tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen, Kemenko PMK memperkenalkan platform **#KITATANGGUH**, inisiatif nasional yang mengintegrasikan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Melalui gerakan ini, kesadaran risiko dan ketangguhan diharapkan tumbuh dari tingkat keluarga hingga daerah rawan bencana.

"Peringatan dini bukan sekadar alat, melainkan wujud kemanusiaan," tutup Lilik penuh makna. "Karena menyelamatkan nyawa berarti memastikan tak satu pun tertinggal dari sistem peringatan dari Sabang sampai Merauke, dari yang mampu mendengar hingga yang tak bisa mendengar."

KOLABORASI YANG TANGGUH: SAAT DUNIA USAHA TURUN TANGAN HADAPI BENCANA

“

PSRM bukan sekadar ajang unjuk kemampuan. “Ini adalah panggilan bersama untuk membangun budaya kesiapsiagaan yang kuat, tangguh, dan berdaya agar dunia usaha bukan hanya bertahan di tengah bencana, tapi menjadi bagian dari solusi bagi bangsa.”



Di tengah meningkatnya ancaman bencana di Indonesia, Kemenko PMK bersama PT Astra International Tbk menggugah semangat baru melalui gelaran Private Sector Resilience Movement (PSRM) 2025 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini bukan sekadar apel peralatan, tetapi simbol dari sinergi besar antara pemerintah dan sektor swasta untuk membangun ketangguhan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa PSRM adalah ruang kolaborasi nyata lintas sektor. “Kita tidak hanya menunjukkan peralatan, tapi menggelorakan semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat,” ujarnya.

Bagi Lilik, keterlibatan sektor swasta dalam penanggulangan bencana bukan sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi investasi jangka panjang untuk keberlanjutan usaha dan rantai pasok nasional. Di negara dengan risiko bencana tinggi seperti Indonesia, kesiapsiagaan dunia usaha berarti juga menjaga stabilitas ekonomi bangsa.

PSRM 2025 menjadi bagian dari gerakan nasional #KITATANGGUH, flagship Kemenko PMK yang berfokus pada tiga komponen: Budaya Tangguh, untuk menanamkan kesadaran dan edukasi risiko; Kolaborasi Tangguh, untuk memperkuat kerja sama lintas sektor; dan Dashboard Tangguh, platform digital pemantauan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh Indonesia. Targetnya ambisius: 100 ribu masyarakat tangguh dan 4 juta orang teredukasi bencana pada 2029.

Ajang ini juga menghadirkan 600 peserta dari kementerian, lembaga, sektor swasta, dan organisasi kemanusiaan, menampilkan berbagai perlengkapan tanggap darurat dari Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial, Kemenkes, hingga BPBD DKI. Sebanyak 168 tim dari 37 perusahaan berkompetisi dalam tujuh lomba teknis seperti Water Rescue, Fire Fighting, Emergency Medical Treatment, dan Vehicle Accident Rescue.

“PSRM bukan sekadar ajang unjuk kemampuan,” tegas Lilik. “Ini adalah panggilan bersama untuk membangun budaya kesiapsiagaan yang kuat, tangguh, dan berdaya agar dunia usaha bukan hanya bertahan di tengah bencana, tapi menjadi bagian dari solusi bagi bangsa.”

MENGUATKAN PAYUNG HUKUM PENANGANAN BENCANA & KONFLIK SOSIAL



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali mengambil langkah strategis dalam penataan kebijakan nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi Tinjauan Regulasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Konflik Sosial. Rapat ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga agar lebih responsif terhadap dinamika kebencanaan dan konflik sosial yang semakin kompleks

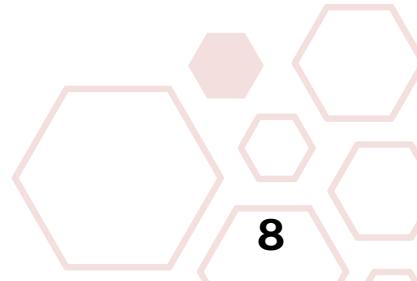
Dipimpin Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial, Asril, kegiatan ini menghadirkan berbagai perwakilan K/L seperti Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kementerian Hukum, Kementerian PPPA, BNPB, serta unit terkait di internal Kemenko PMK. Diskusi berjalan dinamis, menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang selama ini menjadi payung kebijakan penanganan bencana dan konflik sosial.

Salah satu bahasan utama adalah rencana penyusunan Permenko PMK yang mengatur mekanisme sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan antar-K/L, khususnya

terkait penanganan konflik sosial yang muncul akibat penanggulangan bencana yang belum tuntas. Contoh kasus di Adonara Barat, NTT pada 2024 menjadi pengingat bahwa peran Menko PMK dalam penanganan pascakonflik sosial perlu diperjelas melalui payung hukum yang kuat.

Rapat ditutup dengan penekanan pentingnya harmonisasi kebijakan penanggulangan bencana dan konflik sosial. Dampak konflik sosial sering kali setara dengan bencana—mulai dari korban jiwa hingga kerugian ekonomi dan psikologis—namun belum memiliki aturan teknis yang memadai, termasuk terkait penggunaan Dana Siap Pakai.

Dengan penyusunan regulasi yang lebih adaptif, diharapkan masyarakat terdampak dapat menerima perlindungan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.



EKOSISTEM SINERGI PASCABENCANA: LANGKAH BARU PERCEPATAN PEMULIHAN DI INDONESIA

Pemulihan pascabencana di Indonesia memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor, kini sebuah pendekatan yang lebih terintegrasi mulai dibangun untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Langkah besar ini ditandai dengan peluncuran Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diperkenalkan dalam Workshop Sinergi Multipihak di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, hingga relawan menyaksikan pengenalan dua instrumen penting: Kartu Kendali Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai alat pemantauan bersama, serta Forum Kebijakan (RESPON) sebagai wadah bertemunya para pemangku kepentingan. Kehadiran kedua instrumen ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemulihan pascabencana yang selama ini kerap terhambat oleh tumpang tindih program dan lemahnya koordinasi.

Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati, menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan hasil penguatan koordinasi yang ditempuh sepanjang 2025, termasuk melalui Rapat Tingkat Menteri yang melahirkan Keputusan Menko PMK Nomor 34 Tahun 2025.

Menurutnya, tim nasional ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola penanganan pascabencana secara fundamental, sehingga menjadi lebih cepat, efektif, dan terukur.

Ia juga menekankan bahwa percepatan pemulihan mustahil dicapai tanpa sinergi multipihak yang menyentuh berbagai sektor—permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga layanan dasar. Prinsip integratif, adaptif, partisipatif, transparan, dan akuntabel harus menjadi fondasi agar tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri dan seluruh sumber daya dapat dipadukan secara efisien. Keberhasilan sinergi ini sebelumnya telah terlihat dalam penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT, di mana koordinasi lintas pihak mempercepat penyelesaian isu lahan relokasi, hunian sementara, layanan dasar, hingga keberlanjutan pendidikan dan kesehatan.

Melalui rapat perdananya, Tim Koordinasi Nasional ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi perbaikan tata kelola pemulihan pascabencana dari pusat hingga daerah. Dengan dukungan BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kemendikdasmen, pemerintah daerah, relawan, dan mitra pembangunan, Indonesia menata langkah menuju pemulihan yang tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh.





Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial



Kolaborasi Menguat, Indonesia Tangguh Terwujud

Terima kasih telah menyimak Majalah KITA TANGGUH. Semoga semangat kesiapsiagaan dan kolaborasi yang dihadirkan melalui setiap halaman dapat menguatkan langkah kita menuju Indonesia yang lebih tangguh dan siap siaga.

Address Jl. Medan Merdeka Barat No. 3. Jakarta Pusat

Phone (+62) 21 345 9444

Email Informasi umum: roinfohumas@kemenkopmk.go.id

Website <https://www.kemenkopmk.go.id/>

Instagram [deputi5_kemenkopmk](https://www.instagram.com/deputi5_kemenkopmk/)